



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS DANI

2. Jabatan : KPS D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU KEDIRI

3. NHK : 959241

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
 MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 261.000.000

- MOBIL, TOYOTA W101RE LBMFJ 1.5 G CVT / AVANZA Tahun
 2022, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- MOTOR, HONDA NF125SD / SUPRA 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 AT / VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- 4. MOTOR, HONDA D1B02NI2L2 AT / BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- MOTOR, HONDA ACB2J22B03 AT / VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	W.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	105.571.484
F. HARTA LAINNYA	Rp.	KON KON
Sub Total	Rp.	1.941.271.484
III. HUTANG	Rp.	10th 10th
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.941.271.484





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

